

# Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan dan Kesenjangan Daerah di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2014

## *(The Influence of Fiscal Decentralization on Growth and Disparity in East Java Province at 2010-2014 )*

Devis Fauqiatu Taqwa, Teguh Hadi Priyono, Siswoyo Hari Santosa  
Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember (UNEJ)  
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121  
E-mail: [fauqiatudevis@gmail.com](mailto:fauqiatudevis@gmail.com)

### Abstrak

Pembangunan ekonomi daerah merupakan proses gradual yang diharapkan akan terus meningkat seiring dengan kebutuhan untuk menunjang pembangunan nasional. Desentralisasi merupakan langkah strategis yang diharapkan mampu membawa perubahan tatanan pemerintahan kearah yang lebih baik. Salah satu aspek yang berperan penting dalam desentralisasi adalah desentralisasi fiskal yaitu pemberian kewenangan yang disertai dengan kewenangan pendanaan yang bertujuan meningkatkan optimalisasi kewenangan yang telah di desentralisasikan kepada pemerintah daerah. Aspek keuangan mempunyai peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan dalam distribusi pendapatan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan dan kesenjangan daerah di Provinsi Jawa Timur. Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan model *fixed effect* (FEM). Hasil yang diperoleh yaitu desentralisasi fiskal dan variabel kontrol memiliki pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan dan desentralisasi fiskal berpengaruh positif cenderung di daerah pusat industri. Sedangkan pada model kesenjangan, variabel desentralisasi fiskal tidak memiliki pengaruh terhadap kesenjangan daerah dan variabel kontrol memiliki pengaruh yang positif terhadap kesenjangan daerah serta cenderung meningkatkan kesenjangan di wilayah perkotaan

**Kata Kunci:** Desentralisasi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi, Kesenjangan Daerah , Model Efek Tetap (FEM).

### Abstract

*Regional economic development is a gradual process that is expected to continue to increase along with the need to support national development. Decentralization is a strategic step that is expected to bring a change in structure of the administration towards the better. One of aspect that plays an important role in the decentralization is fiscal decentralization which aims to improve local financial independence in the management and budgeting. Financial aspects have an important role in to increase regional economic growth and reducing disparity in regional income distribution. This study aims to determine the influence of fiscal decentralization on growth and disparity in East Java Province. The analytical method used is the panel data regression with fixed effect model (FEM). The results obtained by the fiscal decentralization and control variables have a positive influence on growth and fiscal decentralization positive effect tends in industrial centers. While the model of the disparity, fiscal decentralization variables had no effect on the disparity and control variables have a positive influence on the disparity and tends to increase the disparity in urban areas..*

**Keywords:** Fiscal Decentralization, Economic Growth, Disparity , Fixed Effect Model (FEM).

### Pendahuluan

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Pelaksanaan pembangunan daerah di Indonesia dilakukan melalui otonomi daerah sehingga dapat menjadi sumber kekuatan pembangunan karena berdasarkan apa yang dibutuhkan. Secara langsung, penerapan otonomi daerah ini disesuaikan dengan potensi yang dimiliki masing-masing daerah. Sesuai dengan pendapat Pujiati (2008) penerapan otonomi daerah yang luas saat ini bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi ekonomi yang ada sehingga dapat memacu peningkatan aktivitas perekonomian di daerah pada akhirnya meningkatkan perekonomian nasional. Prinsip pemberian otonomi yang nyata dan bertanggung jawab bagi pemerintah daerah pada dasarnya adalah untuk membantu pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pada dasarnya, pembangunan yang berbasis otonomi daerah ini merupakan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan melalui kreativitas yang dapat ditonjolkan dari potensi daerah sehingga diharapkan dapat meningkatkan kemandirian daerah dalam pengelolaan sumber daya serta pembangunan daerah. Menurut Laode Ida dalam Saragih (2003) mengemukakan bahwa sedikitnya ada tiga esensi dari otonomi daerah. Pertama, pengelolaan kekuasaan berpusat pada tingkat lokal yang berbasis pada rakyat. Kedua, dimensi ekonomi. Artinya dengan otonomi daerah, maka daerah-daerah diharapkan mampu menggali dan mengembangkan sumber-sumber ekonomi yang ada di wilayahnya. Adanya kemampuan daerah untuk membiayai dirinya sendiri paling tidak memperkecil ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Ketiga, dimensi budaya. Artinya

dengan otonomi daerah masyarakat lokal harus diberikan kebebasan untuk berekspresi dalam mengembangkan kebudayaan lokal. Disinilah pentingnya memikirkan kembali strategi pembangunan secara mendasar, yakni pada upaya membangun ekonomi berbasis komunitas lokal

Menurut UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pemerintah daerah dilaksanakan atas: azas otonomi desentralisasi, dekonsentrasi, Instansi Vertikal dan Tugas Pembantuan. Desentralisasi dalam UU ini menganut pengertian bahwa penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Desentralisasi atau otonomi daerah merupakan strategi yang tepat dalam konteks pembangunan dan pemberdayaan daerah sesuai dengan perkembangan dan kondisi masyarakat Indonesia yang saat ini sedang belajar dan mengembangkan demokrasi diberbagai segi. Salah satu aspek yang dijadikan perhatian dalam pelaksanaan azas desentralisasi adalah desentralisasi fiskal. Karena pada umumnya, otonomi daerah diikuti dengan kebijakan fiskal sebagai instrumen dalam mendukung daerah di dalam pelayanan publik dan transfer dana ke daerah.

Indonesia perlu mengembangkan perekonomian yang berbasis pada kekuatan daerah sehingga pengoptimalan akan sektor riil menjadi sangat penting. Menurut Damanhuri dan Findi (2014) yang perlu ditekankan dalam perekonomian adalah bagaimana mengaktifkan sektor riil sehingga memiliki peran langsung dalam pembangunan. Selain itu perlu mendorong investasi agar dapat terealisasikan, mengurangi pengangguran, perlunya intermediasi perbankan, serta sistem keamanan dan perlindungan hukum yang pasti dalam berwirausaha.

Berkaitan dengan potensi investasi, Jawa Timur merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi investasi cukup besar dibandingkan daerah lain. Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur yang selalu positif merupakan daya tarik bagi investor.

Desentralisasi fiskal dalam otonomi daerah dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Provinsi Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang memiliki pertumbuhan ekonomi cukup signifikan dan merupakan provinsi yang cukup berpengaruh terhadap perkembangan pembangunan nasional. Berdampingan dengan Provinsi DKI Jakarta, nilai PDRB Jawa Timur terus meningkat dari tahun 2010 hingga tahun 2014 dimana pada tahun 2010 nilai PDRB Provinsi Jawa Timur sebesar Rp 990.648.800 (dalam Juta Rupiah). Nilai ini terus meningkat hingga pada tahun 2014 nilai PDRB Provinsi Jawa Timur sebesar Rp 1.262.700.200 (dalam Juta Rupiah). Adanya peningkatan pertumbuhan dalam perekonomian akan mengoptimalkan pelaksanaan desentralisasi fiskal terutama dalam pengalokasian anggaran penerimaan dan pembelanjaan. Akan tetapi hal ini tidak menjamin ketergantungan terhadap pemerintah menurun. Justru ketergantungan Provinsi Jawa Timur terhadap pemerintah semakin tinggi dengan adanya peningkatan dalam transfer dana perimbangan.

Pertumbuhan ini juga tidak serta merta mengurangi disparitas terhadap distribusi pendapatan. Penerapan

desentralisasi fiskal yang sudah terjadi justru semakin memperlebar jurang kesenjangan yang ada. Penurunan wewenang kekuasaan untuk pengoptimalan potensi daerah sebagai sumber pendapatan, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Hal ini menyebabkan integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah semakin berkurang. Sebagai akibatnya ketimpangan antar daerah tidak dapat dihindari dan berdampak lebih luas terhadap distribusi pendapatan yang semakin tidak merata.. Selain itu hal ini juga di dukung dengan kondisi geografis Jawa Timur yang memiliki keanekaragaman dan persebaran yang sangat luas. Kontur geografi yang berbeda ini mengakibatkan perbedaan potensi daerah yang ada di Jawa Timur.

Wewenang yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pendapatannya membuat pemerintah daerah dapat menerapkan kebijakan yang dapat menguntungkan daerahnya. Salah satunya adalah kemudahan akses swasta yang dianggap dapat menggairahkan perekonomian melalui investasi. Pada kenyataannya, peran swasta di Jawa Timur dikhususkan pada daerah yang benar-benar memiliki potensi pengembangan baik dilihat dari segi sumber daya alam maupun kualitas modal manusianya. Pada akhirnya, peran swasta tidak dapat merata karena pengkutuban kegiatan perekonomian pada lokasi tertentu. Hal ini berdampak pada kurang keadilan dan pemerataan dalam distribusi pendapatan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, perlu dikaji lebih mendalam mengenai penerapan desentralisasi fiskal serta pengaruhnya terhadap indikator pembangunan untuk mengetahui seberapa efektifkah penerapan fiskal yang sudah dijalankan selama ini sehingga rumusan masalah yang dapat ditarik dari latar belakang "Bagaimana Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Indikator Pembangunan Ekonomi yakni Pertumbuhan dan Kesenjangan Daerah di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2014?"

## Metode Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel terikat dengan variabel bebas.

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu desentralisasi fiskal yang diproksi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan variabel kontrol yang diproksi dari Belanja Daerah sebagai variabel bebas (*Independent variable*) sedangkan pertumbuhan dan kesenjangan sebagai variabel terikat (*dependent variable*) di Provinsi Jawa Timur meliputi 38 Kabupaten/Kota selama kurun waktu 5 tahun mulai tahun 2010-2014.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berbentuk panel yang meliputi 38 kabupaten/kota dan rentang waktu 5 tahun dimulai dari tahun 2010-2014 yang diperoleh dari studi kepustakaan serta publikasi Badan Pusat Statistik Jawa Timur, Dirjen Perimbangan Keuangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2014, Koefisien Gini (*Gini Ratio*) Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2014,

Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2014, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2014.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan menggunakan pendekatan *Ordinary Least Square* (OLS) atau metode kuadrat terkecil.

Dalam penelitian ini, model pertumbuhan dan model kesenjangan merupakan fungsi dari Desentralisasi Fiskal dan Variabel Kontrol.

$$G_{it} = f(FD_{it}, CV_{it})$$

$$D_{it} = f(FD_{it}, CV_{it})$$

Dari persamaan fungsi tersebut kemudian ditransformasikan ke dalam model ekonometrika sebagai berikut:

$$G_{it} = \beta_0 + \beta_1 FD_{it} + \beta_2 CV_{it} + e_{it}$$

$$D_{it} = \beta_0 + \beta_1 \log FD_{it} + \beta_2 \log CV_{it} + e_{it}$$

dimana:

$G$  = Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur

$D$  = Kesenjangan Daerah Provinsi Jawa Timur

$FD$  = *Fiscal Decentralization* Provinsi Jawa Timur

$CV$  = *Control Variabel*

$\log FD$  =  $\log$  *Fiscal Decentralization* Provinsi Jawa Timur

$\log CV$  =  $\log$  *Control Variabel*

$i$  = *cross section*

$t$  = *time series*

$\beta_0$  = konstanta

$e$  = *error term*

dan pusat bisnis. Hasil regresi yang dilakukan pada model kesenjangan menunjukkan jika variabel desentralisasi fiskal bertanda negatif dan tidak memiliki pengaruh terhadap kesenjangan yang ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi (-0.079120) dan nilai probabilitas 0.0729. Sedangkan untuk variabel kontrol memiliki pengaruh positif yang signifikan dengan nilai probabilitas 0.0020 dan koefisien regresi 0.217892. Pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kesenjangan ini lebih cenderung terjadi di wilayah perkotaan.

Nilai Uji t pada model pertumbuhan menunjukkan hasil 17.79416 pada variabel desentralisasi fiskal dan nilai 4.113397 pada variabel kontrol yang mana lebih besar daripada t-tabel 1.645 pada tingkat signifikansi 5% sehingga memiliki pengaruh yang signifikan positif. Sedangkan Uji t yang dilakukan pada model kesenjangan menunjukkan hasil variabel desentralisasi fiskal (dalam bentuk log) sebesar -1.805852 yang mana lebih kecil daripada nilai t-tabel sebesar 1.645 sehingga tidak signifikan dengan tanda yang negatif. Untuk Uji t yang dilakukan pada variabel kontrol (dalam bentuk log) menghasilkan nilai t-hitung sebesar 3.146647 yang lebih besar dibanding t-tabel 1.645 sehingga memiliki pengaruh yang signifikan positif.

Nilai Uji F pada model pertumbuhan menunjukkan hasil sebesar 0.000000 yang lebih kecil dibanding nilai signifikansi 5% artinya secara simultan variabel independen baik desentralisasi fiskal maupun variabel kontrol memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan. Nilai Uji F yang dilakukan terhadap model kesenjangan menunjukkan hasil probabilitas statistik sebesar 0.000000 yang lebih kecil dibanding nilai signifikansi 5% sehingga disimpulkan bahwa ada pengaruh yang nyata antara variabel bebas dengan variabel terikat secara simultan.

Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) yang diperoleh dari pengujian terhadap model pertumbuhan menunjukkan hasil 0.9981. Artinya, variabel desentralisasi fiskal dan belanja daerah dapat menerangkan pertumbuhan sebesar 99.81 persen. Sedangkan sisanya 0,19 persen dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian. Untuk pengujian  $R^2$  pada model kesenjangan, diperoleh hasil sebesar 0.602858. Artinya, kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sebesar 60,28 persen. Dengan demikian, sisanya yaitu 39,78 persen dipengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian.

## Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan dan kesenjangan daerah di Jawa Timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis regresi berganda dengan data panel 38 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Timur dan menggunakan *fixed effect model* (FEM). Hasil penelitian yang dilakukan pada dua model yaitu pertumbuhan dan kesenjangan, menunjukkan bahwa terhadap model pertumbuhan, variabel independen desentralisasi fiskal memiliki pengaruh yang positif dan signifikan dengan nilai probabilitas 0.0000 dan koefisien regresi 32.86927. Variabel kontrol memiliki pengaruh yang positif dan signifikan dengan nilai probabilitas 0.0001 dan nilai koefisien regresi 2.969514. Desentralisasi fiskal yang positif ini cenderung mempengaruhi daerah pusat industri

## Pembahasan

### Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan

Desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan di Jawa Timur. Hasil regresi menjelaskan jika variabel desentralisasi fiskal memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan di Jawa Timur. Artinya apabila ada peningkatan dalam desentralisasi fiskal maka akan meningkatkan pertumbuhan di Provinsi Jawa Timur. Hal ini diduga pengoptimalan potensi daerah pada era desentralisasi fiskal dinilai lebih efisien dalam meningkatkan pendapatan daerah sehingga berdampak positif terhadap

peningkatan pertumbuhan daerah.

Hasil ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Amin Pujiati (2008) yang menghasilkan kesimpulan jika desentralisasi fiskal yang direpresentasikan dengan PAD, DBH, DAU, dan tenaga kerja berpengaruh positif terhadap pertumbuhan. Hasil penelitian ini juga didukung oleh pendapat Davoodi dan Zou dalam Surya (2012) yang menyatakan bahwa penyerahan wewenang kepada pemerintah lokal memiliki dampak yang positif terhadap perekonomian. Alasan yang mendasari hal ini adalah pemerintah lokal jauh lebih dekat kepada rakyat. Dengan demikian, pemerintah lokal akan lebih cepat merespon kebutuhan lokal karena pemerintahan dipegang oleh orang lokal. Pemerintahan lokal mengetahui apa yang masyarakat daerah tersebut butuhkan untuk membangun daerah mereka karena memiliki lebih banyak informasi tentang daerah mereka dibanding pemerintah pusat. Sehingga mereka akan lebih baik dalam penyediaan fasilitas publik.

### **Pengaruh Variabel Kontrol terhadap Pertumbuhan**

Variabel kontrol yang menggunakan proksi belanja daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan di Jawa Timur. Artinya jika ada peningkatan terhadap belanja daerah maka akan meningkatkan pertumbuhan di Jawa Timur. Pengaruh positif ini diduga pembelanjaan anggaran yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pembangunan mendorong pertumbuhan.

Pengaruh yang positif ini sesuai dengan pendapat Sasana (2008) yaitu pengeluaran pemerintah bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menjalankan sektor yang tidak dilakukan oleh sektor swasta seperti memproduksi barang publik. Hasil ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Wibowo (2006) bahwa pengeluaran daerah relatif terhadap pengeluaran nasional mempunyai pengaruh yang signifikan positif terhadap pertumbuhan di Jawa Timur yang mengindikasikan jika kewenangan pengeluaran sebagian besar telah diserahkan pemerintah pusat kepada daerah sehingga efisiensi pelayanan publik telah berjalan dengan baik. Penelitian yang dilakukan oleh Sodik (2007) menjelaskan jika pengeluaran pemerintah yang terdiri dari pengeluaran pembangunan dan pengeluaran rutin berpengaruh signifikan dengan tanda yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Temuan ini mengindikasikan jika pengeluaran pembangunan sangat diperlukan oleh suatu daerah untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemampuannya sendiri.

### **Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Kesenjangan**

Variabel desentralisasi fiskal (dalam bentuk log) yang diregres berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kesenjangan. Tidak signifikan berarti jika ada peningkatan dalam desentralisasi fiskal maka tidak akan terlalu berpengaruh dalam menurunkan kesenjangan.

Berdasarkan data Indeks Gini yang tertera dalam Lampiran F, terlihat jika selama tahun 2010-2014 ketimpangan pendapatan yang ada di Jawa Timur dapat

dikatakan cukup rendah dan juga ada beberapa yang masuk dalam kategori ketimpangan sedang. Yakni tingkat ketimpangan pendapatan tidak sampai melebihi batas 0,5 sehingga dapat dikatakan ketimpangan dalam posisi yang tidak memiliki pengaruh terlalu besar terhadap perekonomian (Sjafrizal, 2014). Selama rentang 5 tahun penelitian tersebut dapat dikatakan jika pelaksanaan desentralisasi fiskal melalui pengoptimalan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak memiliki pengaruh yang berarti terhadap ketimpangan pendapatan masyarakat Jawa Timur. Selain itu juga disebabkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/ Kota sangat kecil terhadap total pendapatan daerah.

### **Pengaruh Variabel Kontrol terhadap Kesenjangan**

Variabel kontrol (dalam bentuk log) memiliki pengaruh yang signifikan dan bertanda positif terhadap kesenjangan. Artinya jika ada peningkatan dalam variabel kontrol maka akan meningkatkan kesenjangan. Pengaruh yang signifikan ini diduga karena adanya perbedaan kemampuan pembiayaan dalam pemenuhan kebutuhan masing-masing daerah terutama dalam penyediaan infrastruktur publik. Suatu daerah yang memiliki pendapatan yang tinggi tentunya sangat berpotensi untuk mengoptimalkan belanja daerah dalam memenuhi kebutuhan pembangunan. Akan tetapi tidak semua daerah kabupaten dan kota di Jawa Timur memiliki pendapatan yang tinggi. Akibatnya terjadi ketimpangan dalam pembiayaan sehingga berdampak pada pembangunan yang kurang merata antar daerah. Selain faktor tersebut, efektivitas dan efisiensi pengalokasian anggaran juga menjadi pengaruh terhadap kesenjangan antar daerah manakala nilai belanja tak langsung jauh lebih besar dibanding dengan belanja langsung sehingga berpengaruh terhadap produktivitas perekonomian.

Hasil penelitian ini menunjukkan meskipun pendapatan suatu daerah tinggi bukan berarti kesenjangan dapat teratasi begitu saja, terlebih dalam era desentralisasi fiskal saat ini yang mana peranan pemerintah daerah sangat menentukan dalam pengalokasian pendapatan untuk pembelanjaan dalam memenuhi kebutuhan pembangunan. Sesuai dengan pengertian desentralisasi itu sendiri, maka pemerintah daerah dapat mengupayakan pengoptimalan pendanaan melalui potensi yang dimiliki daerah. Artinya, pembelanjaan pun juga didasarkan atas pendapatan yang diterima. Hal ini menimbulkan distorsi perekonomian antar daerah. Besaran nilai belanja daerah paling tinggi ada pada daerah industri seperti Malang, Gresik, Sidoarjo dan Surabaya yang berarti kebutuhan pembiayaan tinggi ada pada daerah-daerah tersebut. Sedangkan daerah-daerah yang minim perekonomiannya seperti Bangkalan, Sampang, dan daerah lain yang tidak memiliki prioritas industri harusnya memiliki anggaran belanja yang tinggi karena kebutuhan dalam peningkatan perekonomian jauh lebih tinggi dibanding daerah yang memiliki potensi industri. Yang perlu diperhatikan juga adalah ketika adanya peningkatan belanja bagi daerah miskin diimbangi dengan peningkatan belanja daerah kaya. Kenaikan tingkat pembiayaan yang sama akan

menyebabkan disparitas pendapatan tidak dapat diatasi.

### Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan adalah Desentralisasi Fiskal dan Variabel Kontrol berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan di Jawa Timur serta ada kecenderungan desentralisasi fiskal dan variabel kontrol meningkatkan pertumbuhan di daerah pusat bisnis atau industri. Desentralisasi Fiskal berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kesenjangan dan Variabel Kontrol memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap kesenjangan serta ada kecenderungan variabel kontrol meningkatkan kesenjangan di wilayah perkotaan.

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, saran yang dapat penulis berikan berkaitan dengan pelaksanaan desentralisasi fiskal di Jawa Timur yaitu Daerah yang menjadi pusat industri dapat diberikan kewenangan berupa ruang fiskal yang lebih besar yang di inisiasikan oleh daerah sendiri seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), Peningkatan belanja daerah di Kabupaten semestinya lebih diutamakan dibanding Kota, mengingat belanja daerah cenderung meningkatkan kesenjangan di wilayah Kota.

### Ucapan Terima Kasih

Puji syukur atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia yang di berikan Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan dan Kesenjangan Daerah di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2014” dengan lancar. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Strata Satu (S1) pada Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Ucapan terima kasih setulus-tulusnya peneliti sampaikan kepada semua pihak yang telah dengan ikhlas membantu proses penyelesaian penelitian ini. Atas segala bantuan yang diberikan peneliti mengucapkan terima kasih kepada Ayahanda Alm. Soepardi dan Ibunda Sumini, Bapak Dr. Teguh Hadi P., SE, M.Si, Bapak Dr. Siswoyo Hari S., SE., M.Si, Ibu Dr. Sebastiana Viphindartin, M.Kes, Bapak Dr. M. Fathorrazi, S, serta seluruh pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

### Daftar Pustaka/Rujukan

[1] Ajija, S.R., et.al. 2011. *Cara Cerdas Menguasai Eviews*. Jakarta: Salemba Empat.

[2] Arsyad, L. 1999. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.

[3] Arsyad, L. 2010. *Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Edisi Kedua. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.

[4] Badan Pusat Statistik. 2015. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota Menurut Lapangan Usaha 2010-2014*. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur.

[5] Damanhuri, D.S dan M. Findi. 2014. *Masalah dan Kebijakan : Pembangunan Ekonomi Indonesia*. Bogor: Penerbit IPB Press.

[6] Dirjen Perimbangan Keuangan. 2010-2014. *APBD Provinsi Jawa Timur*.

[7] Dumairy. 1996. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.

[8] Effendi, N. dan Maman Setiawan. 2014. *Ekonometrika: Pendekatan Teori dan Terapan*. Jakarta: Salemba Empat.

[9] Gujarati, D.N. dan Dawn C. Porter. 2010. *Dasar-dasar Ekonometrika*. Edisi 5 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.

[10] Gujarati, D.N. dan Dawn C. Porter. 2012. *Dasar-dasar Ekonometrika*. Edisi 5 Buku 2. Jakarta: Salemba Empat.

[11] Khusaini, M. 2006. *Ekonomi Publik Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah*. Malang: BPFE Universitas Brawijaya.

[12] Nachrowi, N.D., dan Hardius Usman. 2006. *Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika Untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*. Jakarta: LPFE Universitas Indonesia.

[13] Rahayu, A.S. 2010. *Pengantar Kebijakan Fiskal*. Jakarta: PT Bumi Aksara

[14] Saragih, J.P. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia

[15] Sjafrizal. 2014. *Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

[16] Sukirno, S. 2013. *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

[17] Supranto, J. 2004. *Ekonometri*. Buku Kedua. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.

[18] Tambunan, T.T.H. 1996. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

[19] Tarigan, R. 2009. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi Edisi Revisi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

[20] Wardhono, A. 2004. *Mengenal Ekonometrika: Teori dan Aplikasi*. Jember: UPT Penerbitan Universitas Jember.

[21] Widarjono, A. 2013. *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

[22] Winarno, W.W. 2009. *Analisis Ekonometrika dan Statistika Eviews*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

[23] Akai, N., Sakata, M. 2002. *Fiscal Decentralization Contributes to Economic Growth: Evidence From State-Level Cross-Section Data for The United States*. Journal of Urban Economics, Vol. 52 (93-108). Academic Press.

[24] Aulia, N. 2014. *Hubungan Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, dan Kesenjangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012*. Economics Development Analysis Journal Vol. 3 No. 2 – Universitas Negeri Semarang.

[25] Mopangga, H. 2011. *Analisis Ketimpangan Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Gorontalo*. Jurnal Trikonomika Vol 10 NO. 1 (40-51). Gorontalo- FE dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo.

[26] Nurman, M.A. 2013. *Pengaruh desentralisasi Fiskal Terhadap Disparitas Pendapatan Regional di Indonesia Tahun 2001-2008*. Jurnal Organisasi dan Manajemen, Vol. 9 No. 1 (1-20).

[27] Pujiati, A. 2008. *Analisis Pertumbuhan Ekonomi di Karesidenan Semarang Era Desentralisasi Fiskal*. Jurnal Ekonomi Pembangunan Hal. 61-70. Universitas Negeri Semarang.

[28] Sasana, H. 2008. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Investasi Swasta di Jawa Tengah*. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Vol 1 No. 1- FE Universitas Negeri Semarang.

[29] Sasana, H. 2009. *Peran Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah*. Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 10 No. 1 (103-124) – FE Universitas Diponegoro Semarang.

[30] Setiyawati, A. dan Ardi Hamzah. 2007. *Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK dan Belanja Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Pengangguran: Pendekatan Analisis Jalur*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia Vol 4 No. 2 (211-228) – FE Universitas Trunojoyo.

[31] Situngkir, F., et.al. 2014. *Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara*. Jurnal Ekonomi Vol. 17 No. 3. Medan - Universitas Sumatera Utara.

[32] Sodik, J. 2007. *Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi Regional: Studi Kasus Data Panel di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 12 No. 1. Yogyakarta - UPN Veteran.

[33] Sumarsono, H. 2009. *Analisis Kemandirian Otonomi Daerah: Kasus*

- Kota Malang (1999-2004). Penelitian - Jurnal Ekonomi Studi Pembangunan (JESP) Vol. 1 No. 1.
- [34] Surtikanti. 2013. *Permasalahan Otonomi Daerah Ditinjau dari Aspek Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah*. Majalah Ilmiah UNIKOM Vol. 11 No. 1 – Universitas Komputer Indonesia.
- [35] Surya, R. 2012. *Fiscal Decentralization, Growth and Disparity Among Region In Indonesia*. Jurnal BPPK, Vol. 4 No.3 (38-57). Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan- Kementerian Keuangan.
- [36] Tandiwana, E, et.al. 2015. *Pengaruh Investasi Swasta dan Belanja Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dampaknya Terhadap Kesempatan Kerja di Kota Manado Tahun 2001-2012*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Vol 15 No 1. Manado – FE dan Bisnis Ekonomi Pembangunan Universitas Sam Ratulangi Manado.
- [37] Tasrin, K dan Putri Wulandari. 2012. *Kajian Pengaruh Kebijakan Desentralisasi Pada Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus: Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat)*. Jurnal Borneo Administrator Vol. 8 No. 2. Sumedang - Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I Lembaga Administrasi Negara.
- [38] Wahyuni, I.G.A., et.al. 2014. *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesenjangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol. 3 No. 8 (458-477). Bali- Universitas Udayana.
- [39] Bappeda Provinsi Jawa Timur. 2008. *RPJMD Jawa Timur Tahun 2009-2014*.
- [40] Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- [41] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- [42] TAP MPR Nomor IV/MPR/1999 Tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004.
- [43] UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- [44] UU Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- [45] UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- [46] Argi, R. 2011. *Analisis Belanja Daerah dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2004-2009*. Semarang. Skripsi- Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- [47] Ariani, K.R. 2010. *Pengaruh Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dan Tax Effort (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Wilayah Eks Karesidenan Surakarta)*. Surakarta. Skripsi - Universitas Sebelas Maret.
- [48] Qoyimah, K. 2014. *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Penduduk, Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Investasi di Jawa Timur (Periode 1982-2012)*. Jember. Skripsi-Universitas Jember.
- [49] Sianturi, Y.S. 2011. *Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Wilayah (Studi Kasus Kabupaten/Kota Propinsi Sumatera Utara)*. Semarang. Skripsi – Universitas Diponegoro.
- [50] Suryanto, D. 2011. *Analisis Pengaruh Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Subosukawonosraten Tahun 2004-2008*. Semarang. Skripsi - Universitas Diponegoro.
- [51] Thesaurianto, K. 2007. *Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kemandirian Daerah*. Semarang. Tesis – Universitas Diponegoro.
- [52] Waluyo, Joko. 2007. *Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antardaerah di Indonesia*. Penelitian. Yogyakarta-Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”.
- [53] Wibowo, M.A. 2006. *Analisa Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Jawa Timur*. Malang. Skripsi- Universitas Brawijaya.